

## ABSTRAKS

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (Studi di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)**

Fokus tesis ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang banyak terjadi. kajian tesis ini penting untuk dilakukan penelitian sebab dalam kenyataan prakteknya di masyarakat banyak ditemui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam UU no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Tesis ini membahas berdasarkan 2 (dua) permasalahan pertama , bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Wangunharja telah di dasarkan atau sesuai dengan UU no 2 tahun 1960? dan yang kedua, apakah perjanjian bagi hasil tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak

Untuk menganalisis 2 (dua) permasalahan tersebut, dilakukanlah penelitian di wilayah Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Penulis melakukan jenis penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan yuridis empiris (*socio legal*). Ini artinya tesis ini menggunakan 2(dua) pendekatan sekaligus normatif dan empirik. Teori yang digunakan adalah teori bekerjanya hukum , teori *the living law* dan nilai keadilan. Kesimpulan dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa temuan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Wangunharja berlangsung menggunakan hukum kebiasaan/adat secara tidak tertulis , karena memberikan rasa nyaman yang didasarkan pada rasa percaya dan keinginan untuk saling tolong menolong. Proses yang tidak rumit serta keterbatasan biaya. Sehingga UU no 2 tahun 1960 tidak efektif digunakan di Desa Wangunharja, mereka merasa bahwa perjanjian bagi hasil yang mengacu pada UU no 2 tahun 1960 terlalu rumit. Perjanjian yang dibuat tidak tertulis menyebabkan kekuatan hukumnya tidak kuat.

Dari temuan-temuan tersebut diatas diajukan beberapa rekomendasi yakni pertama untuk dapat melaksanakan UU No. 2 tahun 1960 dengan baik perlu adanya sosialisasi kembali dari Pemerintah bukan hanya kepada masyarakat sebagai Adriset (sasaran) tapi kepada pihak-pihak terkait yakni aparat Kecamatan dan Desa. Dan kedua, hendaknya Pemerintah melakukan pembaharuan mengenai peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman untuk lebih menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat.

**Kata kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Keadilan**

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING AGREEMENT OF AGRICULTURAL LAND BASED ON LAW NO 2 OF 1960 ON PROFIT SHARING AGREEMENT (A Study in Wangunharja Village, Lembang Sub-District, West Bandung Regency)

The focus of this was the implementation of profit sharing agreement of agricultural land which frequently occurred. This thesis study is important to examine because in practice there were many implementations of profit sharing agreement of agricultural land which were not in accordance with Law No 2 of 1960 on profit sharing agreement.

This thesis discussed 2 (two) problems; first, how the implementation of profit sharing agreement of agricultural land in Wangunharja Village based on or in accordance with Law No 2 of 1960. Second, has the profit sharing agreement met the sense of justice of the parties.

To analyze the 2 (two) problems, a research was conducted in Wangunharja Village, Lembang Sub-District, West Bandung Regency. The writer conducted the descriptive research with the approach method of empirical-judicial (socio legal). It means that this thesis used 2 (two) approaches namely normative and empirical. The theories applied were the theory of the operation of law, the theory of the living law, and justice law. The conclusion from the data obtained was analyzed in qualitative.

From the research conducted, it was found that the profit sharing agreement of agricultural land in Wangunharja Village used the customary law which was not written since it was considered comfortable based on trust and the willingness to help each other, uncomplicated process and limited cost. Therefore, Law No 2 of 1960 was not effectively applied in Wangunharja Village because it was found that the profit sharing agreement referring to LAW No 2 Of 1960 is too complicated. The unwritten agreement led to weak power of law.

From the finding above, some recommendations were proposed; first, to be able to implement Law No 2 of 1960 well, resocialization from the government is required, not only to the society as the Adriset (target) but also to the relevant parties such as the officials of sub-district and villages. Second, the government should renew the law concerning the needs and the development of time to guarantee the improvement of people's lives better.

**Keywords: Profit Sharing Agreement, Justice**